



**Pemkab.
Tasikmalaya**

Perubahan Rencana Kerja

T.A 2024



**Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya**





PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/KEP.42/BPKPD/2024

LAMPIRAN :

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD), sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024, tentang Perubahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
28. Surat Edaran nomor : 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya;
29. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024; dan
 2. Merumuskan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA
PADA TANGGAL : 22 APRIL 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 196810081988031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/KEP.42/BPKPD/2024

TANGGAL : 22 APRIL 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

- Penanggung jawab : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Ketua : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
- Sekretaris : Perencana Ahli Muda
- Anggota : Kepala Bidang Aset Daerah
- : Kepala Bidang Anggaran
- : Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
- : Kepala Bidang Perbendaharaan
- : Kepala Bidang Pelayanan Pajak Daerah
- : Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah
- : Perencana Ahli Pertama
- : Staff Fungsional Umum PEP

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

Kompleks Perkantoran Jl. Sukapura V ☎ (0265) 543504 - Fax. (0265) 543505
Web: bpkpd.tasikmalayakab.go.id / Email: bpkpd@tasikmalaya.go.id
SINGAPARNA - 46415

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : RC.04.02/Kep.60 /BPKPD/2024
LAMPIRAN :

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
TAHUN 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala BPKPD tentang Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
27. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2024, tentang Perubahan tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
28. Surat Edaran nomor : 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya;
29. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021- 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

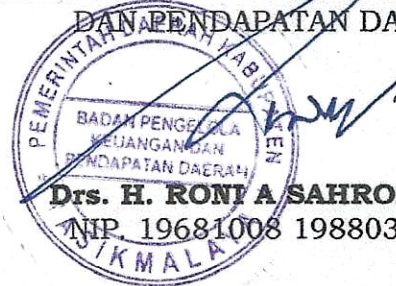
KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya..

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA

PADA TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2024

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN PENDAPATAN DAERAH,



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M

NIP. 19681008 198803 1 003

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt. karena atas Rahmat dan Karunia-Nya Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Perubahan Rencana Kerja ini disusun dikarenakan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Edaran Nomor: 0023 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Sehingga, Perangkat Daerah perlu melakukan penyesuaian khususnya dalam pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium. Hal tersebut sebagai bentuk dari tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2023.

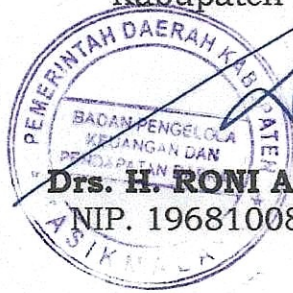
Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 ini mengacu pada Renstra BPKPD Tahun 2021–2026 yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Tahun 2024. Serta disusun dengan memperhatikan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini. Penyusunan perubahan renja disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi BPKPD yang merupakan unsur penunjang urusan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Akhir kata, semoga

Renja perubahan ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pencapaian tujuan, sasaran dan target capaian kinerja serta sebagai pedoman pelaksanaan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024, sehingga menghasilkan dokumen perencanaan yang baik dalam rangka mendukung pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya.

Tasikmalaya, 3 September 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL..... iv

1 BAB I PENDAHULUAN 1-1

1.1 Latar Belakang..... 1-1

1.2 Landasan Hukum..... 1-3

1.3 Maksud dan Tujuan 1-7

1.4 Sistematika Penulisan..... 1-8

2 BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
LALU S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 2-1

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2-1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah2-20

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah.....2-27

3 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 3-1

PERANGKAT DAERAH..... 3-1

4 BAB IV PENUTUP 4-1

DAFTAR TABEL

Tabel T-C29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 2-3

Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya..... 2-24

Tabel 3.1 Sasaran Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 3-1

Tabel 3.2 Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub kegiatan..... 3-6

Tabel 3.3 Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Subkegiatan..... 3-10

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) sebagai salah satu perangkat daerah yang mendukung ketercapaian sasaran pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, memiliki kewajiban menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Renja digunakan sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kewenangan pengelolaan sumber daya manusia serta evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam mengembangkan visi, misi dan tujuan organisasi.

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor : 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Kabupaten Tasikmalaya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka Perangkat Daerah (PD) termasuk BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berkewajiban menyusun Perubahan Renja PD yang berpedoman pada Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan

(selama Triwulan II) menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu :

1. Terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Surat Edaran Nomor: 0023 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Belanja Modal dan Belanja Honorarium di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2024. Sehingga, Perangkat Daerah harus melakukan penyesuaian dalam pengelolaan belanja modal dan belanja honorarium;
2. Terdapat perubahan target indikator sasaran Nilai Reformasi Birokasi. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 nilai RB BPKPD jauh melampaui target yang telah ditetapkan dan telah mencapai sebesar 78,07. Capaian tersebut juga telah melampaui target pada tahun 2024, maka BPKPD pada tahun 2024 – 2026 harus menetapkan target diatas capaian tahun 2023;
3. Penambahan atau pengurangan target indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, serta penambahan/pengurangan dan pergeseran pagu anggaran sub kegiatan;
4. Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target sasaran BPKPD Tahun 2024 sebagaimana ditetapkan dalam Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya TA 2024 adalah penjabaran dari Renstra BPKPD Kabupaten Tasikmalaya 2021–2026. Kedua dokumen tersebut mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 serta mendasarkan pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 dan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2005-2025. Perubahan Renja BPKPD Kabupaten Tasikmalaya berfungsi sebagai pedoman dan rujukan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2024, dimana pencapaian sasaran-sasaran yang direncanakan pada BPKPD serta pembangunan pada Pemerintah Daerah tetap

memperhatikan sinergitas dengan program dan kebijakan Pemerintah Provinsi/Pusat.

Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan. Perubahan renja BPKPD tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program dan kegiatan/sub kegiatan dari anggaran semula Rp. 737.703.200.417,00 menjadi anggaran perubahan sebesar Rp. 736.709.613.917,00. Terdapat penambahan dan pengurangan pagu anggaran, dan yang paling signifikan yaitu adanya pengurangan pada sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak yang merupakan sub kegiatan dari PPKD sebesar Rp. 1.400.000.000,00, hal tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan dari TAPD Kabupaten Tasikmalaya.

Penyusunan Perubahan Renja Tahun 2024 Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 293 dan 330. Penerbitan PP No. 12 Tahun 2019 tersebut mencabut aturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang sebelumnya diatur dalam PP No. 58 Tahun 2005. Penyempurnaan pengaturan pada PP No. 12 Tahun 2019 tersebut dilakukan untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 146 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
27. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024;
28. Surat Edaran Bupati Tasikmalaya Nomor 0022 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
29. Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2021–2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan untuk periode 1 (satu) tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, serta sebagai bahan pendukung penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah (RKAP Perangkat Daerah) yang selanjutnya untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPA Perangkat Daerah) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja BPKPD Tahun 2024 adalah :

1. Menjadi acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024;
2. Menyediakan arahan bagi aparatur BPKPD Kabupaten Tasikmalaya dalam mencapai tujuan dengan implementasi program, kegiatan dan sub kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;

- 3. Menjadi tolok ukur kinerja dalam implementasi program, kegiatan serta sub kegiatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II- HASIL EVALUASI RENJA BPKPD KAB. TASIKMALAYA S.D TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) BPKPD Kab. Tasikmalaya s.d Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III - RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV - PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU S/D TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu merupakan salah satu upaya untuk mengetahui sampai sejauh mana Perangkat Daerah dapat melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Sehingga atas dasar evaluasi tersebut dapat diketahui faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja dan kebijakan/tindakan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Penyerapan total anggaran BPKPD pada tahun 2023 sebesar 90,44% lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Data Terlampir pada tabel TC-29) dengan realisasi Rp. 732.327.095.840,00 dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 809.728.466.043,00. Untuk keseluruhan penyerapan anggaran telah baik, namun masih terdapat 3 sub kegiatan yang penyerapannya masih rendah (dibawah 80%) diantaranya pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (masih terdapat gaji untuk P3K di Kabupaten Tasikmalaya yang belum tersalurkan dikarenakan baru akan di lantik pada tahun 2024), sub kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (tidak ada pengajuan publikasi dari media) dan sub kegiatan Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota (masih banyak Desa yang belum melunasi pajak PBB P2 sehingga DBH nya belum dapat tersalurkan).

Pada Tahun 2024 BPKPD melaksanakan 4 program, 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 737.703.200.417,00 yang terdiri dari belanja untuk gaji dan tunjangan ASN BPKPD sebesar Rp. 27.475.796.266,00 penyaluran belanja daerah sebesar Rp. 694.155.448.126,00 serta untuk kegiatan BPKPD sebesar Rp. 16.071.956.025,00. Realisasi

anggaran BPKPD sampai dengan triwulan II mencapai 46,09% atau sebesar Rp. 340.041.352.437,00 dengan persentase *output* sebesar 44,40%. Terdapat 9 sub kegiatan yang telah selesai melaksanakan kegiatan dengan *output* 100% selain itu terdapat 6 sub kegiatan yang belum terdapat realisasi anggaran dan *output* dikarenakan sesuai rencana aksi akan dilaksanakan pada triwulan selanjutnya. Untuk lebih jelasnya evaluasi Renja sampai Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel TC- 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d TW II Tahun 2024

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)					Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d tahun berjalan					
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) (11 = (10/4)			
(1)					(2)	(3)	(4)		(5)		(6)		(7)		(8)	(9)		(10)		
5	2				KEUANGAN			5.156.942. 512.645		1.604.381. 225.341		809.728.4 66.043		732.327. 095.840	90,44		737.703. 200.417		2.676.749 .673.618	51,91
5	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	83 Poin	929.027.58 3.833	80 Poin	181.323.06 2.754	81 Poin	99.804.31 7.938	80 Poin	30.069.7 94.920	30,13	82 Poin	27.683.7 96.266	82 Poin	220.646.8 04.175	23,75
						Nilai IKM Perangkat Daerah	87 Poin	45.960.200 .528	87 Poin	10.334.012 .492	86,75 Poin	4.698.721 .714	86,76 Poin	4.533.29 6.129	96,48	86,80 Poin	7.019.02 2.925		19.170.70 0.099	41,71
5	2	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	388 Dokumen	1.120.729. 900	115 Dokumen	275.587.95 0	96 Dokumen	53600000	96 Dokumen	53.250.3 00	99,35	96 Dokumen	208.000. 000	44 dokumen	420.874.7 50	37,55

5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	91 Dokumen	799.347.400	24 Dokumen	210.996.600	26 Dokumen	30.000.000	26 Dokumen	29.748.800	99,16	23 Dokumen	143.000.000	18 dokumen	292.936.900	36,65
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	158 Laporan	223.877.500	44 Laporan	41.939.750	-	-	-	-	-	-	-	-	41.939.750	18,73
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	139 Laporan	97.505.000	47 Laporan	22.651.600	70 Laporan	23.600.000	70 Laporan	23.501.500	99,58	72 Laporan	65.000.000	26 dokumen	85.998.100	88,2
5	2	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	100 Persen	927.906.853.933	100 Persen	181.047.474.804	100 Persen	99750717938	100 Persen	30.016.544.620	30,09	100 Persen	27.475.796.266	57,14%	220.225.929.425	23,73
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105 orang/ bulan	927.906.853.933	94 orang/ bulan	181.047.474.804	95 orang/ bulan	99.750.717.938	95	30.016.544.620	30,09	95 orang/ bulan	27.475.796.266	95 orang/ bulan	220.225.929.425	23,73
5	2	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	100 Persen	2.603.587.100	100 Persen	430.476.912	100 Persen	75.000.000	100 Persen	74.549.429	99,4	100 Persen	447.340.000	72,93 Persen	891.182.497	34,23

5	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 Paket	168.380.000			0	0	0	-	-	2 Paket	84.190.000	1 Paket	51.000.000	-
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	882 Orang	2.435.207.100	275 Orang	430.476.912	12 Orang	75.000.000,00	12 Orang	74.549.429	99,4	145 Orang	363.150.000	139 orang	840.182.497	34,5
5	2	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	100 Persen	13.355.569.301	100 Persen	3.631.273.699	100 Persen	1.758.463.858	100 Persen	1.680.543.139	95,57	100 Persen	2.711.416.225	66,67%	6.971.344.175	52,2
5	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5 Paket	282.050.000	5 Paket	94.883.170	1 Paket	30.006.000	1 Paket	30.004.405	99,99	1 Paket	30.000.000	2/4 paket (3 bulan)	144.865.075	51,36
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	15 Paket	3.463.250.309	6 Paket	978.329.375	3 Paket	472.805.000	3 Paket	464.621.029	98,27	3 Paket	640.084.800	3 paket	2.057.720.754	59,42
5	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	15 Paket	420.253.882	8 Paket	182.262.813	1 Paket	40.000.000	1 Paket	38.957.000	97,39	1 Paket	39.997.000	2/4 paket (3 bulan)	245.155.013	58,33
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	1.182.300.000	8 Paket	261.520.000	1 Paket	100.000.000	1 Paket	99.200.000	99,2	1 Paket	350.000.000	2/4 paket (3 bulan)	395.370.000	33,44

5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	3.317.076.150	4 Paket	1.090.203.024	1 Paket	530.153.858	1 Paket	477.028.000	89,98	1 Paket	760.169.400	1 Paket	2.283.544.924	68,84
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	20 Dokumen	712.000.000	8 Dokumen	71.320.000	4 Dokumen	49.499.000	4 Dokumen	35.260.000	71,23	4 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	123.640.000	17,37
5	2	1	2.06	7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	5 Paket	259.797.760	2 Paket	79.021.900	-	-	-	-	-	-	-	-	79.021.900	30,42
5	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60 Laporan	574.080.000	24 Laporan	239.200.000	4 Laporan	146.000.000	4 Laporan	146.000.000	100	4 Laporan	328.000.000	2 Laporan	475.245.000	82,78
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	60 Laporan	2.498.395.200	24 Laporan	634.533.417	4 Laporan	315.000.000	4 Laporan	314.695.715	99,9	4 Laporan	488.165.025	2 Laporan	1.067.704.519	42,74
5	2	1	2.06	10	Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaa n Arsip Dinamis pada SKPD	4 Dokumen	446.366.000	-	-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	24.776.990	99,11	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	49.076.990	10,99
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen	200.000.000	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100	-			50.000.000	25

5	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Kantor	100 Persen	10.174.531 .937	100 Persen	641.468.50 0	-	-	-	-	-	-	606.381. 900	88,75%	1.090.025 .400	10,71
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan	25 Unit	4.005.950.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	21 Unit	1.131.414.3 57	4 Unit	197.937.80 0	-	-	-	-	-	1 Unit	81.690.00 0	1 Paket	271.797.8 00	24,02
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	120 Unit	4.631.456.7 80	30 Unit	403.960.70 0	-	-	-	-	-	40	524.691.9 00	31 unit	778.657.6 00	16,81
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 Unit	405.710.80 0	1 Unit	39.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	39.570.00 0	9,75
5	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	9.906.920. 030	100 Persen	3.208.801. 685	100 Persen	15449577 14	100 Persen	1.496.89 9.805	96,89	100 Persen	1.664.00 0.000	66,67%	5.495.439 .938	55,47

5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60 Laporan	5.660.255.1 20	24 Laporan	1.897.518.6 49	12 Laporan	843.994.0 00	12 Laporan	827.537. 357	98,05	12 Laporan	926.000.0 00	6 Laporan	3.098.609. 746	54,74
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakaan	5 Laporan	349.742.00 0	2 Laporan	124.000.00 0	1 Laporan	57.000.00 0	1 Laporan	57.000.0 00	100	1 Laporan	63.000.00 0	1 Laporan	235.000.0 00	67,19
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60 Laporan	3.896.922.9 10	24 Laporan	1.187.283.0 36	1 Laporan	643.963.7 14	1 Laporan	612.362. 448	95,09	12 Laporan	675.000.0 00	6 Laporan	2.161.830. 192	55,48
5	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tingkat pemuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 Persen	9.919.592. 160	100 Persen	2.421.991. 696	100 Persen	13203001 42	100 Persen	1.281.30 3.756	97,05	100 Persen	1.589.88 4.800	51,10%	4.722.708 .089	47,61
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	70 Unit	3.876.624.7 00	70 Unit	1.212.333.4 37	70 Unit	650.300.1 42	70 Unit	614.461. 860	94,49	70 Unit	799.990.0 00	70 Unit	2.164.518. 874	55,84

5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1.665 Unit	2.423.721.460	666 Unit	926.252.800	143 Unit	285.000.000	143 Unit	282.362.430	99,07	167 Unit	400.000.000	89 Unit	1.529.769.290	63,12
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3 Unit	3.619.246.000	3 Unit	283.405.459	3 Unit	385.000.000	3 Unit	384.479.466	99,86	3 Unit	389.894.800	3 unit	1.028.419.925	28,42
5	2	2			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	4.126.422.088.024	100 Persen	1.401.619.878.050	100 Persen	701.570.365.391	101,36 Persen	694.172.784.632	98,95	100 Persen	697.591.118.126	32,82%	2.420.964.644.142	58,67
5	2	2	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	100 Persen	10.150.083.938	100 Persen	3.304.715.948	100 Persen	1602539000	105,45 Persen	1.589.499.953	99,19	100 Persen	2.175.109.000	23,90%	5.712.696.105	56,28
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	5 Dokumen	727.478.000	2 Dokumen	196.994.914	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.915.321	97,83	1 Dokumen	85.000.000	0	274.678.195	37,76
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	5 Dokumen	707.500.000	2 Dokumen	180.485.615	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	48.979.970	97,96	1 Dokumen	85.000.000	0	239.126.925	33,8
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	495.978.000	121 Dokumen	182.377.971	59 Dokumen	40.000.000	59 Dokumen	38.842.955	97,11	59 Dokumen	80.000.000	0	221.220.926	44,6
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	500.978.000	121 Dokumen	183.095.518	59 Dokumen	40.000.000	59 Dokumen	38.841.457	97,1	59 Dokumen	80.000.000	0	221.936.975	44,3

5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	483.700.00 0	121 Dokumen	147.154.46 0	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	39.866.1 20	99,67	59 Dokumen	72.500.00 0	59 Dokumen	254.884.5 68	52,69
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang diverifikasi	298 Dokumen	421.910.00 0	121 Dokumen	166.769.98 6	59 Dokumen	40.000.00 0	59 Dokumen	39.863.9 00	99,66	59 Dokumen	76.000.00 0	0	206.633.8 86	48,98
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.516.806.5 00	4 Dokumen	389.110.74 4	2 Dokumen	210.000.0 00	2 Dokumen	209.410. 887	99,72	2 Dokumen	169.800.0 00	0	598.521.6 31	39,46
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.659.425.0 00	4 Dokumen	461.160.23 4	2 Dokumen	190.000.0 00	2 Dokumen	189.320. 550	99,64	2 Dokumen	169.800.0 00	0	657.007.5 84	39,59
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah dokumen regulasi serta kebijakan bidang anggaran	8 Dokumen	411.000.00 0	5 Dokumen	99.989.611	5 Dokumen	105.000.0 00	8 Dokumen	104.861. 740	99,87	4 Dokumen	386.770.0 00	4 dokumen	488.175.8 11	118,78

5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah	5 Dokumen	2.037.132.5 00	2 Dokumen	935.755.29 6	1 Dokumen	430.000.0 00	1 Dokumen	428.737. 625	99,71	1 Dokumen	586.394.0 00	0	1.597.535. 892	78,42
5	2	2	2.01	13	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penganggaran daerah Pemerintah Kabupaten/ Kota	1,192 Orang	1.188.175.9 38	804 Orang	361.821.59 9	440 Orang	407.539.0 00	440 Orang	401.859. 428	98,61	318 Orang	383.845.0 00	200 orang	952.973.7 12	80,2
5	2	2	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendahara an Daerah	100	3.317.482. 600	100	660.836.78 1	100	28967500 0	100	289.265. 697	99,86	100	531.261. 000	50,00%	1.166.871 .433	35,17
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	177 Dokumen	465.499.50 0	-	-	59 Dokumen	92.875.00 0	59 Dokumen	92.725.0 00	99,84	-	-		92.725.00 0	19,92
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah dokumen hasil pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	708 Dokumen	314.999.50 0	-	-	-	-	-	-	-	239 Dokumen	52.050.00 0	118 dokumen	33.083.00 0	10,5

5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	865.041.37 5	24 Dokumen	282.065.74 3	12 Dokumen	98.400.00 0	12 Dokumen	98.158.5 00	99,75	12 Dokumen	220.000.0 00	6 Dokumen	477.415.6 04	55,19
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	6 Dokumen	314.999.50 0	-	-	-	-	-	-	-	2	119.211.0 00	1 dokumen	16.259.75 0	5,16
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah dokumen hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	891.942.97 5	24 Dokumen	280.444.13 8	12 Dokumen	98.400.00 0	12 Dokumen	98.382.1 97	99,98	12 Dokumen	140.000.0 00	6 Dokumen	449.061.1 79	50,35

5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaa n dan Pertanggungja waban Sub Kegiatan	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	98.326.900	-	-	-	-	-	-	-	98.326.900	65,55	
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaa n Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan penatausahaa n keuangan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	195 Dokumen	314.999.750	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	2	2	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	100 Persen	6.416.479.490	100 Persen	1.316.044.288	100 Persen	481900000	100 Persen	454.400.705	94,29 Persen	100 Persen	729.300.000	40,70%	2.018.149.470	31,45
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	64 Dokumen	938.500.000	16 Dokumen	112.005.256	16 Dokumen	124.000.000	16 Dokumen	116.245.111	93,75	16 Dokumen	143.930.000	7 Dokumen	270.042.567	28,77

5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungja waban pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	85 Laporan	880.038.00 0	34 Laporan	261.377.94 6	17 Laporan	116.900.0 00	17 Laporan	103.226. 246	88,3	17 Laporan	89.900.00 0	7 Laporan	403.222.4 25	45,82
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi	4 Dokumen	655.000.00 0	1 Dokumen	47.507.634	1 Dokumen	50.000.00 0	1 Dokumen	47.014.2 38	94,03	3 Dokumen	132.000.0 00	3 laporan	220.544.7 71	33,67
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungja waban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Ko ta	10 Dokumen	1.353.815.0 00	4 Dokumen	433.814.06 5	2 Dokumen	150.000.0 00	2 Dokumen	147.869. 660	98,58	2 Dokumen	177.500.0 00	0	586.204.8 70	43,3

5	2	2	2.03	9	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	16 Dokumen	1.011.077.490	2 Dokumen	243.627.226	-	-	-	-	-	-	-	243.627.226	24,1	
5	2	2	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah	4 Dokumen	630.000.000	2 Dokumen	69.687.688	-	-	-	-	1 Dokumen	75.000.000	0	69.687.688	11,06	
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjaban Pemerintah Kabupaten/ Kota	310 orang	520.049.000	180 orang	101.048.718	59 orang	41.000.000	59 orang	40.045.450	118 orang	55.000.000	0	141.094.168	27,13	
5	2	2	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/ Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/ Kota yang dibina	160 Lembaga	428.000.000	40 Lembaga	46.975.755	-	-	-	-	40 Lembaga	55.970.000	40 lembaga	83.725.755	19,56	
5	2	2	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitas Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 Persen	4.106.538.041.996	100 Persen	1.396.338.281.033	100 Persen	6,99196E+11	100 Persen	691.839.618.277	98,95	100 Persen	694.155.448.126	16,67%	2.412.066.927.134	58,74

5	2	2	2.04	8	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah laporan hasil analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan	60 Laporan	3.815.124.788.867	24 Laporan	1.332.890.619.600	12 Laporan	655.087.943.000	12 Laporan	652.146.914.700	99,55	12 Laporan	650.021.869.000	6 Laporan	2.306.514.619.100	60,46
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana darurat dan mendesak	5 Laporan	233.897.874.625	2 Laporan	46.525.537.433	1 Laporan	31.458.863.083	1 Laporan	30.279.044.577	96,25	1 Laporan	30.000.000.000	0	78.574.287.034	33,59
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan hasil pengelolaan dana bagi hasil Kabupaten/ Kota	5 Laporan	57.515.378.504	2 Laporan	16.922.124.000	1 Laporan	12.649.445.308	1 Laporan	9.413.659.000	74,42	1 Laporan	14.133.579.126	0	26.978.021.000	46,91
5	2	3			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	89 Persen	8.725.325.000	81 Persen	1.515.100.672	83 Persen	624000000	84,68 Persen	610.273.240	Persen 97,80	83 Persen	956.202.100		2.425.614.153	27,8
5	2	3	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 Persen	8.725.325.000	100 Persen	1.515.100.672	100 Persen	624000000	100 Persen	610.273.240	97,8	100 Persen	956.202.100	37,50%	2.425.614.153	27,8
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang disusun	8 Dokumen	1.300.295.705	2 Dokumen	301.754.240	2 Dokumen	70.000.000	2 Dokumen	68.723.840	98,18	2 Dokumen	131.267.000	1 Dokumen	379.713.080	29,2
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah	10 Dokumen	310.000.000	8 Dokumen	47.997.385	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	29.918.400	99,73	2 Dokumen	44.835.100	1 Dokumen	83.776.385	27,02

5	2	3	2.01	5	Penatausahaa n Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaa n Barang Milik Daerah	1 Laporan	600.000.00 0			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil pengamanan barang milik daerah	21 Laporan	1.975.088.2 25	8 Laporan	794.673.42 5	4 Laporan	277.000.0 00	4 Laporan	265.906. 000	95,99	4 Laporan	526.100.0 00	0	1.181.529. 866	59,82
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtang anan, Pemusnahan, Dan Penghapusan Barang Milik Daerah;	6 Dokumen	1.500.000.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	60 laporan	1.068.000.0 00	24 laporan	224.245.93 2	59 laporan	247.000.0 00	59 laporan	245.725. 000	99,48	12 laporan	254.000.0 00	6 laporan	634.165.1 32	59,38
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Ko ta	Jumlah orang yang mngikuti pembinaan pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kab/Kota	329 Orang	1.971.941.0 70	60 Orang	146.429.69 0	-	-	-	-	-	-	-	146.429.6 90	7,43	
5	2	4			PROGRAM PENGELOLAA N PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 Persen	46.807.315 .260	100 Persen	9.589.171. 373	100 Persen	30310610 00	100 Persen	2.940.94 6.919	97,03	100 Persen	4.453.06 1.000	29,76	13.541.91 1.049	28,93

5	2	4	2.01		Pengelolaan pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	100 Persen	46.807.315.260	100 Persen	9.589.171.373	100 Persen	3031061000	100 Persen	2.940.946.919	97,03	100 Persen	4.453.061.000	29,76	13.541.911.049	28,93
5	2	4	2.01	1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	8 Laporan	860.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1 Laporan	276.280.000	0	29.972.003	3,49
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	1.800.000.000	1 Dokumen	96.920.570	1 Dokumen	164.641.000	1 Dokumen	164.541.696	99,94	2 Dokumen	591.280.000	0	305.626.637	16,98
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	16 Laporan	1.860.000.000	4 Laporan	141.407.835	4 Laporan	84.000.000	4 Laporan	83.911.442	99,89	4 Laporan	100.000.000	1 Laporan	266.701.275	14,34
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	34 Unit	6.806.923.200	12 Unit	2.731.812.578	6 Unit	1.311.000.000	6 Unit	1.303.476.830	99,43	7 Unit	1.881.000.000	3 Unit	4.416.894.123	64,89
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek pajak dan Wajib pajak daerah	12 Laporan	3.112.900.000	8 Laporan	250.126.909	1 Laporan	54.070.000	1 Laporan	53.976.504	99,83	4 Laporan	96.280.000	1 Laporan	327.835.873	10,53
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan	Jumlah Laporan hasil Pengolahan,	1 Laporan	1.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

					Basis Data Pajak Daerah	Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	1.285.969 OP	16.051.415.000	300.958 OP	2.797.159.457	-	-	-	-	-	-	-	2.797.159.457	17,43	
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	5 Layanan	3.933.806.240	13 Layanan	1.405.134.120	12 Layanan	514.520.000	12 Layanan	514.234.592	99,94	12 Layanan	512.550.000	1 Layanan	2.241.341.922	56,98
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	24 Dokumen	500.000.000	-	-	12 Dokumen	38.256.000	12 Dokumen	38.185.000	99,81	12 Dokumen	43.256.000	6 Dokumen	45.539.000	9,11
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	60 Dokumen	5.803.351.750	24 Dokumen	1.351.336.772	12 Dokumen	764.000.000	12 Dokumen	682.411.633	89,32	12 Dokumen	843.970.000	6 Dokumen	2.170.287.405	37,4
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	20 Dokumen	4.578.919.070	8 Dokumen	815.273.132	4 Dokumen	100.574.000	Dokumen 4	100.209.222	99,64	4 Dokumen	108.445.000	1 Laporan	940.553.354	20,54
Total							100	5.156.942.512.645	101,63	1.604.381.225.341		809.728.466.043		732.327.095.840	90,44	100	737.703.200.417	44,40	2.676.749.673.618	51,91

Sumber : BPKPD, diolah

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan RPJMD tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah:

**“ DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN
KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI,
BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”**

Untuk mewujudkan Visi Bupati dan Wakil Bupati, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. BPKPD selaku perangkat daerah yang memiliki tugas sebagai fungsi penunjang urusan keuangan mendukung pada misi ke-2 (dua) yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional**. Selanjutnya berdasarkan visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Berdasarkan Renstra BPKPD Tahun 2021-2026 tujuan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah **Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Yang Akuntabel Dan Berorientasi Pelayanan Prima** dengan indikator tujuan;

- Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun sasaran dalam tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah** dengan indikator sasaran;
 - Nilai reformasi birokrasi perangkat daerah
2. **Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan
3. **Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan
4. **Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah** dengan indikator sasaran;
 - Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah

Secara umum capaian sasaran strategis BPKPD menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun ada beberapa indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Capaian tahun sebelumnya akan menjadi tolak ukur penilaian kinerja untuk tahun berikutnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Nilai Reformasi Birokrasi BPKPD pada tahun 2023 ditargetkan dapat tercapai sebesar 69. Berdasarkan Hasil penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Tim Asesor Kabupaten Tasikmalaya dan Tim Independen Provinsi Jawa Barat nilai RB BPKPD Tahun 2023 adalah 78,07 Dengan Kategori Baik. Meskipun terdapat kendala dalam persiapan penilaian RB di tahun 2023 karena penilaian yang dilakukan sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. BPKPD dapat meningkatkan nilai RB dari tahun sebelumnya, bahkan melebihi dari target yang

ditetapkan. jika dibandingkan dengan target akhir renstra dengan nilai 81 maka capaian realisasi sampai tahun ketiga renstra sudah terealisasi 96,38%.

Sasaran mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel dengan indikator sasaran Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah mencapai 100% sejak tahun pertama Renstra yaitu pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target akhir tahun Renstra, persentase capaian tahun 2023 adalah 100%.

Sasaran mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel dengan indikator sasaran persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan dihitung dari perbandingan antara total aset berupa tanah dan kendaraan dibandingkan dengan total aset (tanah dan kendaraan) yang memiliki bukti kepemilikan yang sah. Berdasarkan data jumlah aset (tanah dan kendaraan) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya per 30 Desember 2023 sebanyak 3.923 dan yang telah memiliki kepemilikan yang sah sebanyak 3.322. Sehingga persentase barang milik daerah yang telah dilengkapi dengan bukti kepemilikan sebesar 84,68% atau dengan capaian kinerja sebesar 102,02% dari target tahun 2023 sebesar 83%. Nilai pada tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya yang mencapai 80,77%.

Sasaran meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator sasaran Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah pada tahun 2023 ditargetkan tumbuh sebesar 5,11%. Persentase pertumbuhan pajak daerah tahun 2023 berdasarkan LRA *Audited* menunjukkan pertumbuhan sebesar 3,97% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp. 94.355.650.449,00. Penerimaan pajak tahun 2023 sebesar Rp. 98.097.622.047,00 tercapai sebesar 95,75% dari target penerimaan pajak yaitu Rp. 102.450.000.000,00. Apabila dilihat

dari target pertumbuhan pajak tahun 2023 sebesar 5,11% sedangkan yang terealisasi hanya 3,97 % sehingga persentase ketercapaian memperoleh 77,61% hasil capaian kinerja tersebut dihitung dari $((\frac{3,97}{5,11} \times 100) = 77,61\%)$. Untuk lebih jelasnya capaian kinerja BPKPD Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel T-C 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya

No	Indikator (IKU/ SPM/ IKK/ SDG's)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	78,019	79	80	81	70,144	79	80	81	Indikator Tujuan
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	69	78,25	78,50	78,75	78,070	78,25	78,50	79	IKU PD
3	Rata-rata persentase penetapan APBD yang tepat waktu; laporan keuangan dan pelayanan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	100	100	100	100	100,000	100	100	100	IKU PD
4	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	%	83	86	89	90	84,680	86	89	90	IKU PD
5	Persentase Pertumbuhan Pajak Daerah	%	5,11	5,18	5,24	5,30	3,966	5,18	5,24	5,30	IKU PD

6	Persentase PAD	%	10,8	10,91	11,01	11,01	9,491	10,91	11,01	11,01	IKD
7	Opini BPK	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
8	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
9	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	4,379	2,19	1,94	1,69	IKD
10	Persentase SILPA	%	2,44	2,19	1,94	1,69	4,379	2,19	1,94	1,69	IKD
11	Penetapan APBD	Tepat Waktu/ Tidak Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	IKD
12	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	4,59	4,49	4,39	4,29	8,293	4,49	4,39	4,29	IKD
13	Rasio PAD	%	1,24	1,32	1,41	1,51	0,744	1,32	1,41	1,51	IKD
14	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	60	61	62	63	64,523	61	62	63	IKD
15	Opini Laporan Keuangan	Interprestasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	IKD
16	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	13,54	13,44	13,34	13,24	1,513	13,44	13,34	13,24	IKD
17	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	7,91	7,81	7,71	7,61	13,826	7,81	7,71	7,61	IKD
18	Manajemen Aset		Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	IKD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta telah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2022, dimana BPKPD mempunyai tugas yang strategis pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, yakni sebagai pengelola keuangan yang berwenang dalam melaksanakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah meliputi kesekretariatan, penyelenggaraan penyusunan anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan, aset daerah, perencanaan dan penetapan pendapatan daerah, pembinaan pengembangan dan penagihan pendapatan, dan unit pelaksana teknis. Namun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan dan hambatan yang dihadapi.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPKPD pada Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi sistem berbasis elektronik pada pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah belum dapat berjalan secara optimal;
2. Belum optimalnya pelaksanaan dan pemanfaatan BMD Kabupaten Tasikmalaya dan masih terdapat 217 bidang tanah yang belum tersertifikasi, hal tersebut dikarenakan terdapat aset tanah/bangunan yang belum *clear and clean* serta kesulitan dalam penyediaan kelengkapan dokumen untuk proses pensertifikatan;

3. Belum optimalnya database pajak daerah yang dapat digunakan sebagai sumber dalam perencanaan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
4. Pada Tahun 2024 dengan mulai dilakukannya implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD yang diturunkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diperkirakan akan berdampak terhadap penurunan PAD karena berdasarkan peraturan tersebut terdapat tarif pajak yang mengalami penurunan, diantaranya tarif pajak parkir yang semula 30% menjadi 10%, tarif pajak hiburan dari 25% menjadi 10% dan juga pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) yang sebelumnya ditetapkan paling rendah sebesar Rp60.000.000,00 menjadi Rp. 80.000.000,00 dengan tarif 5%;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk pelayanan di BPKPD Kabupaten Tasikmalaya.

Arah Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024, dalam rangka menindaklanjuti isu strategis yang dihadapi serta untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak dan Retribusi Daerah, sebagai berikut :

1. Melakukan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta melakukan digitalisasi terhadap pelayanan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah khususnya dalam pelayanan pajak dan retribusi yang diharapkan akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan para wajib pajak dan wajib retribusi.
2. Melakukan percepatan dan koordinasi dengan pihak ATR/BPN terkait jadwal dalam pengukuran dan penerbitan sertifikat;
3. Melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;

4. Melakukan pengkajian terhadap jenis-jenis pajak daerah, dalam rangka peningkatan penerimaan pajak daerah;
5. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan di lingkungan BPKPD.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Tujuan, Sasaran, Strategis dan kebijakan selanjutnya harus dituangkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja serta pendanaan indikatif selama tahun 2024. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan mendukung Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, sesuai dengan tugas dan fungsi BPKPD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah. Pada tahun 2024 BPKPD berfokus pada peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, peningkatan PAD, peningkatan pelayanan publik serta peningkatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.

Pada perubahan tahun 2024 BPKPD merencanakan 4 Program 13 Kegiatan dan 60 Sub kegiatan, serangkaian program kegiatan dan sub kegiatan telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sasaran Perangkat Daerah. Berikut rekapitulasi sasaran dan program/kegiatan/sub kegiatan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Perubahan Tahun 2024:

Tabel 3.1

Sasaran dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kabupaten Tasikmalaya

No.	Sasaran PD	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
A	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
I		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

III		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
1		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
IV		Administrasi Umum Perangkat Daerah
1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7		Fasilitasi Kunjungan Tamu
8		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
V		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1		Pengadaan Mebel
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
VII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
B	Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
I		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
1		Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
2		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
3		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD
4		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD
5		Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD

6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

7		Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota
IV		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1		Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
2		Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
3		Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
C	Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib dan akuntabel	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I		Pengelolaan Barang Milik Daerah
1		Penyusunan Standar Harga
2		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
3		Pengamanan Barang Milik Daerah
4		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah
D	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
I		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
1		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
2		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
4		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
5		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
7		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
8		Penagihan Pajak Daerah
9		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 disusun berdasarkan isu strategis serta memuat janji Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, yang tertuang dalam prioritas pembangunan dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026, sehingga keterkaitan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan arah kebijakan RPJMD untuk Tahun 2025 sangat erat. Terdapat 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 meliputi:

1. Prioritas 1, yaitu Peningkatan Pelayanan Pendidikan

2. Prioritas 2, yaitu Peningkatan Pelayanan Kesehatan Daerah serta Penurunan Angka Prevalensi Stunting
3. Prioritas 3, yaitu Pembangunan Infrastruktur untuk Peningkatan Konektivitas Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi
4. Prioritas 4, yaitu Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
5. Prioritas 5, yaitu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
6. Prioritas 6, yaitu Peningkatan Infrastruktur dan Daya Saing Produk Pertanian dan Perikanan untuk Menunjang Ketahanan Pangan
7. Prioritas 7, yaitu Peningkatan Ekonomi Masyarakat melalui Pengembangan Sektor Unggulan Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro
8. Prioritas 8, yaitu Inovasi Pelayanan Publik
9. Prioritas 9, yaitu Peningkatan Kemandirian Desa
10. Prioritas 10, yaitu Dukungan Pelaksanaan Pemilu Pilkada

Berdasarkan 10 (sepuluh) Prioritas Pembangunan yang tercantum pada RKPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, BPKPD mendukung pembangunan melalui Prioritas Pembangunan Daerah nomor 8 yakni Inovasi Pelayanan Publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah terus dilakukan, khususnya untuk pajak dan retribusi. Digitalisasi pajak dan retribusi akan mempermudah masyarakat dalam pelaporan dan pembayaran pajak dan retribusi. Peningkatan kualitas layanan akan meningkatkan partisipasi dan kepatuhan para wajib pajak dan wajib retribusi.

Pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan harus mendukung terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG bukanlah suatu program atau kegiatan melainkan suatu strategi, strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk mencapai suatu keadilan gender sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Nasional. Tujuan dari PUG adalah memastikan seluruh kebijakan, program dan kegiatan telah setara dan adil bagi laki-laki, perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia dan kelompok rentan lainnya.

Sehingga dalam melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan harus memperhatikan aspek dalam mendukung PUG tersebut. Pada perubahan anggaran tahun 2024 BPKPD direncanakan melaksanakan 4 program 13 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan jumlah dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 736.709.613.917,00

untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Berdasarkan 10 (Sepuluh) Prioritas Pembangunan
Perubahan Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Keterangan
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.905.269.691	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	269.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	143.000.000	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.475.796.266	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.475.796.266	
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	447.340.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	84.190.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	363.150.000	
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.332.416.225	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.999.500	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	640.084.800	

3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	59.997.500
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	120.000.000
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	760.169.400
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	70.000.000
7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	180.000.000
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	388.165.025
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	64.000.000
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	881.381.900
1	Pengadaan Mebel	81.690.000
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	799.691.900
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.708.970.500
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	988.470.500
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.000.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	657.500.000
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.790.364.800
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	895.030.000
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	505.440.000
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	389.894.800
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	696.395.081.126
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.379.072.000
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	62.450.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	62.450.000
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	72.102.000
4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	72.102.000
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	72.500.000

6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	76.000.000
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	226.800.000
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	226.800.000
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	601.780.000
10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	586.394.000
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	319.694.000
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	531.261.000
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	52.050.000
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	220.000.000
3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	119.211.000
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	140.000.000
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	729.300.000
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	143.930.000
2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	99.900.000
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	132.000.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	177.500.000

5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	75.000.000
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	50.000.000
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	50.970.000
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	692.755.448.126
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	650.021.869.000
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	28.600.000.000
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	14.133.579.126
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	956.202.100
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	956.202.100
1	Penyusunan Standar Harga	131.267.000
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	44.835.100
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	526.100.000
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	254.000.000
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.453.061.000
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.453.061.000
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	276.280.000
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	591.280.000
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100.000.000
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1.881.000.000
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	96.280.000
6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	512.550.000
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	43.256.000
8	Penagihan Pajak Daerah	843.970.000
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.445.000
TOTAL		736.709.613.917

Tabel 3.3
Rencana Perubahan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2024

Rencana Perubahan Tahun 2024 (tahun rencana)									
No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Indikator Kinerja		Lokasi	Target Capaian		Kebutuhan Dana/Pagu Indikator (Rp.)		Sumber Dana
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah		82	82	27.683.796.266	27.744.796.266	
		Nilai IKM Perangkat Daerah	Nilai IKM Perangkat Daerah		87,00	87,00	7.019.022.925	7.160.473.425	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		95 Dokumen	101 Dokumen	208.000.000	269.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	23 Dokumen	27 Dokumen	143.000.000	143.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	72 Laporan	74 Laporan	65.000.000	126.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan	Persentase Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang Sesuai Aturan		100 %	100 %	27.475.796.266	27.475.796.266	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1316 Orang/bulan	95 Orang/bulan	27.475.796.266	27.475.796.266	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD	Cakupan Peningkatan Kapasitas ASN BPKPD		100 %	100 %	447.340.000	447.340.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Paket	2 Paket	84.190.000	84.190.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	152 Orang	143 Orang	363.150.000	363.150.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Umum		100 %	100 %	2.711.416.225	2.332.416.225	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	30.000.000	49.999.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	3 Paket	640.084.800	640.084.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	39.997.000	59.997.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	350.000.000	120.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Paket	1 Paket	760.169.400	760.169.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	328.000.000	180.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Laporan	4 Laporan	488.165.025	388.165.025	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000	64.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan kantor		100 %	100 %	606.381.900	881.381.900	
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	1 Unit	81.690.000	81.690.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	4 Unit	43 Unit	524.691.900	799.691.900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa		100 %	100 %	1.664.000.000	1.708.970.500	

		penunjang urusan pemerintahan daerah	penunjang urusan pemerintahan daerah						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	926.000.000	988.470.500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Laporan	1 Laporan	63.000.000	63.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	675.000.000	657.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Tingkat pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	100 %	1.589.884.800	1.790.364.800	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	70 Unit	70 Unit	799.990.000	895.030.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	143 Unit	255 Unit	400.000.000	505.440.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	3 Unit	389.894.800	389.894.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
B	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	697.591.118.126	696.395.081.126	
I	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	100 %	2.175.109.000	2.379.072.000	
1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	62.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000	62.450.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000	72.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	59 Dokumen	59 Dokumen	80.000.000	72.102.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	72.500.000	72.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	59 Dokumen	59 Dokumen	76.000.000	76.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000	226.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	169.800.000	226.800.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	4 Dokumen	386.770.000	601.780.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	586.394.000	586.394.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
11	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	396 Orang	318 Orang	383.845.000	319.694.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
II	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah		100 %	100 %	531.261.000	531.261.000	
1	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	236 Dokumen	236 Dokumen	52.050.000	52.050.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	220.000.000	220.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

3	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	119.211.000	119.211.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Dokumen	12 Dokumen	140.000.000	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
III	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah		100 %	100 %	729.300.000	729.300.000	
1	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	16 Dokumen	16 Dokumen	143.930.000	143.930.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

2	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	17 Laporan	15 Laporan	89.900.000	99.900.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	3 Laporan	3 Laporan	132.000.000	132.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	177.500.000	177.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
5	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000	75.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	118 Orang	118 Orang	55.000.000	50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

		Pemerintah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten/Kota						
7	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	40 Lembaga	40 Lembaga	55.970.000	50.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
IV	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Fasilitasi Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah		100 %	100 %	694.155.448.126	692.755.448.126	
1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	12 Laporan	650.021.869.000	650.021.869.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000.000	28.600.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1 Laporan	14.133.579.126	14.133.579.126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
C	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi	Persentase Barang Milik Daerah yang telah dilengkapi		86 %	86 %	956.202.100	956.202.100	

		dengan Dokumen Bukti Kepemilikan	dengan Dokumen Bukti Kepemilikan						
I	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah		100 %	100 %	956.202.100	956.202.100	
1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	131.267.000	131.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	2 Dokumen	44.835.100	44.835.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	526.100.000	526.100.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	12 Laporan	12 Laporan	254.000.000	254.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
D	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100 %	100 %	4.453.061.000	4.453.061.000	

I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah	Persentase Pengelolaan Pajak Daerah		100 %	100 %	4.453.061.000	4.453.061.000	
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	2 Dokumen	1 Dokumen	276.280.000	276.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Dokumen	2 Dokumen	591.280.000	591.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	10 Unit	25 Unit	1.881.000.000	1.881.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum

5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	4 Laporan	96.280.000	96.280.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
6	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Singaparna, Sukaasih	1 Layanan	1 Layanan	512.550.000	512.550.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
7	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	43.256.000	43.256.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Dokumen	12 Dokumen	843.970.000	843.970.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kab Tasikmalaya, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	4 Dokumen	108.445.000	108.445.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum
TOTAL							737.703.200.417	736.709.613.917	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 mengacu pada hasil evaluasi Renja sampai dengan triwulan II Tahun 2024. Renja disusun dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024. Perubahan Renja Tahun 2024 digunakan sebagai dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan daerah pada Tahun 2024.

Perubahan Renja didasari dengan adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan telaahan kembali terhadap perencanaan anggaran khususnya dalam pengalokasian untuk belanja modal dan belanja honorarium serta terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran dan perubahan dalam indikator sub kegiatan. Perubahan renja BPKPD tahun 2024 dari hasil rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pagu anggaran Rp. 737.703.200.417,00 menjadi sebesar Rp. 736.709.613.917,00 pada perubahan Anggaran. Perubahan anggaran ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan DPA Perubahan (DPPA) BPKPD Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2024 ini masih memerlukan penyempurnaan, sehingga diharapkan tanggapan dan saran dari semua pihak untuk Renja BPKPD yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Tasikmalaya, 3 September 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Pendapatan Daerah
Kabupaten Tasikmalaya



Drs. H. RONI A SAHRONI, M.M
NIP. 19681008 198803 1 003